

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah

Vol 6 No 2 Tahun 2024, p 214-225

Article

Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam Upaya Pemerataan Pembangunan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Deni Saputra^{1*}, Imam Sunarto², Asmuni³

¹²³ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Jember, Indonesia

* Correspondence Author: denisaputra230920@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to explain road infrastructure development policy in Kemiri Village, Panti Sub-district. The location of this research is Kemiri Village, Panti Sub-district, Jember Regency, Jember. This research uses a qualitative descriptive approach. Types and There are two types and sources of data in this research, namely primary data and secondary data. Data collection was conducted through observation, interviews and documentation. Data analysis includes data collection, data condensation, data presentation and conclusion drawing. conclusion drawing. The important finding in this research is the existence of inequality in road infrastructure development between hamlets in Kemiri Village, There are two hamlets in Kemiri Village that do not yet have adequate road infrastructure, such as damaged asphalt roads, broken There are two hamlets in Kemiri Village that do not have adequate road infrastructure, such as damaged asphalt roads, uneven paving, and muddy dirt roads. and dirt roads that are muddy when it rains. The results of this research shows that the successful implementation of the road infrastructure development policy in infrastructure development policy in Kemiri Village is influenced by four factors, namely the delivery of communication, clarity and consistency of communication. communication, the clarity and consistency of good communication, the existence of adequate resources, the existence of dispositions that have adequate resources, the existence of dispositions that have commitment and responsibility, and the structure of the responsibility and a clear and coordinated bureaucratic structure. structure that is clear and coordinated*

Keywords: *Policy Implementation, Development, Road Infrastructure*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kemiri Kecamatan Panti. Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur jalan antar dusun di Desa Kemiri, terdapat dua dusun di Desa Kemiri yang belum memiliki infrastruktur jalan yang memadai seperti jalan aspal yang rusak, pembangunan jalan paving yang belum merata, dan jalan tanah yang becek ketika hujan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kemiri dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu penyampaian komunikasi, kejelasan dan konsistensi komunikasi yang baik, adanya sumber daya yang memadai, adanya disposisi yang memiliki komitmen dan tanggungjawab serta struktur birokrasi yang jelas dan terkoordinasi

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pembangunan, Infrastruktur Jalan.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu topik yang selalu disebut-sebut dalam diskusi mengenai otonomi daerah di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan rumah tangganya sendiri (Purnawan, 2020). Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik harus dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu desa, dimana pada tingkat pemerintahan desa inilah terjadi interaksi langsung dengan masyarakat.

Dalam (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) yang pada intinya undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk menangani permasalahan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa, tujuan utama dari pelimpahan kewenangan ini adalah untuk mempermudah menjangkau permasalahan di tingkat bawah. Undang-undang ini menjelaskan bahwa desa diberikan kesempatan untuk membangun desanya dalam pembangunan infrastruktur agar masyarakat desa lebih sejahtera dan maju (Irmansyah et al., 2021). Jalan merupakan salah satu bidang dalam otonomi daerah yang diberikan keleluasaan untuk dikelola oleh pemerintah desa dengan menggunakan dana yang diperoleh, baik dari potensi daerah, bantuan maupun dana perimbangan pemerintah pusat.

Pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran penting untuk mendukung kegiatan ekonomi, budaya, sosial, politik, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Cahyani et al., 2023) Ketersediaan infrastruktur yang baik akan berdampak baik pula pada aktivitas yang dilakukan oleh warga atau masyarakat, namun sebaliknya jika infrastruktur buruk kemungkinan besar akan berdampak buruk pula pada masyarakat seperti aktivitas petani yang merasa terganggu ketika membawa hasil panen, aktivitas pelajar yang merasa terganggu aktivitas pendidikannya karena menguras waktu sehingga para pelajar malas atau enggan untuk belajar karena faktor infrastruktur jalan yang buruk (Brüna, 2021).

Oleh sebab itu, pemerintah dapat memberikan yang terbaik atau memfasilitasi infrastruktur dengan baik, yang mana telah dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan sarana yang paling mendasar dan dominan yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menunjang aktivitas masyarakat dalam kelangsungan hidup (Sasmito, 2017). Salah satu faktor kesenjangan ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yaitu Kesenjangan pembangunan infrastruktur menurut Saswika (dalam Rahman & Novitasari, 2018). Selain itu pembangunan infrastruktur ini merupakan langkah dari pemerintah yang dijadikan sebagai pondasi dalam membangun kawasan ekonomi baru sehingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar (Pratama & Randianto, 2023).

Menurut Soetomo (dalam Kurniawan & Maani, 2020) dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan, diharapkan para pengendara mampu memanfaatkan jalan sebagai akses untuk mempermudah dan memperlancar aktivitas seperti mobilisasi barang dan jasa, pemasaran hasil pertaniannya dan lain sebagainya.

Desa Kemiri merupakan sebuah desa yang terletak di sebelah utara Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Mayoritas masyarakat di Desa Kemiri berprofesi sebagai petani, karyawan perkebunan, sehingga pembangunan infrastruktur jalan sangat dibutuhkan oleh Desa Kemiri, Kecamatan Panti (Fawzy, 2020). Secara umum, ketertinggalan pembangunan jalan di Desa Kemiri masih terlihat terutama di beberapa dusun. Terdapat beberapa dusun yang mengalami ketimpangan pembangunan infrastruktur jalan dibandingkan dengan dusun lainnya di Desa Kemiri.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa kedua

dusun di Desa Kemiri yaitu dusun tenggiling dan dusun danci belum memiliki sarana dan prasarana transportasi yang memadai, masih banyak jalan yang rusak seperti jalan yang berlubang sehingga mengganggu kenyamanan pengendara, konstruksi jalan yang belum terselesaikan, konstruksi pengerasan jalan yang belum merata di beberapa titik jalan dan jalan yang becek ketika hujan turun (Bearak, 2020).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas dapat dilihat dari perspektif sejauh mana kebijakan pembangunan jalan di Desa Kemiri berhasil tercapai dengan optimal. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan tentang pembangunan jalan di Desa Kemiri ini mampu mengubah kondisi dan situasi dan kondisi yang ada di masing-masing dusun khususnya dusun tenggiling dan dusun danci (Ndwandwe, 2021).

Untuk itu, tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dalam upaya pemerataan pembangunan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Kebijakan menurut Ealau & Prewit (dalam Agustino, 2017) adalah sebagai keputusan tetap yang dicirikan oleh pengulangan dan konsistensi tingkah laku baik dari individu yang membuat keputusan maupun individu yang mematuhi keputusan tersebut. Adapun alam pengertian yang lain kebijakan diartikan sebagai serangkaian tindakan atau tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan dan kesempatan untuk mengusulkan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan.

Menurut Thomas R. Dye (dalam Anggara, 2014) kebijakan publik mencakup segala sesuatu yang pemerintah lakukan atau tidak lakukan, serta alasan mengapa kebijakan itu harus dilakukan dan apakah itu bermanfaat bagi kehidupan bersama. Kebijakan harus dipikirkan secara menyeluruh agar mereka memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan tidak menimbulkan masalah yang merugikan, bahkan kerugian akan di setiap kebijakan yang di tetapkan (Allouhi, 2022). Oleh karena itu kebijakan harus bijak dalam menetapkan suatu kebijakan yang akan diputuskan.

Dalam pengertian yang lain menurut (Novan et al., 2018) implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Tahap-tahap kebijakan menurut William Dunn (dalam Anggara, 2014), adalah sebagai berikut:

- a. Penyusun Agenda
- b. Formulasi Kebijakan
- c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan
- d. Implementasi Kebijakan
- e. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan

Menurut George Edward III (Widodo, 2021: 96-107) implementasi kebijakan oleh beberapa faktor antara lain:

- a) Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting agar implementasi kebijakan dapat tercapai. Implementasi yang efektif hanya dapat dicapai jika pengambil keputusan telah mengetahui apa yang akan dilakukannya. Komunikasi mempunyai beberapa dimensi,

antara lain transmisi, kejelasan (clarity), dan konsistensi. Informasi kebijakan ini harus dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan agar mereka memahami isi, tujuan, arah, sasaran kelompok sasaran, sehingga para para pelaksana dapat mempersiapkan dengan baik serta tujuan kebijakan dapat tercapai.

b) Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal yang berpengaruh dalam mengimplemtasikan kebijakan dengan baik. Terdapat beberapa faktor yang menentukan terkait keefektifan dan efisiensi sumberdaya, antara lain yaitu, staf, fasilitas, sumber daya anggaran (sumber dana), dan kewenangan (Jordt, 2023). Oleh karena itu informasi yang jelas dan konsisten program tersebut harus dilaksanakan dan seberapa tepat informasi tersebut dikomunikasikan. Namun apabila personil yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut kekurangan sumber daya untuk melaksanakan tugasnya, maka kebijakan tersebut akan terkendala.

c) Disposisi

Dalam disposisi faktor yang mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi kebijakan yaitu sikap pelaksana. Jika pelaksana setuju dengan sebagian isi kebijakan maka ia bersedia melaksanakannya, namun jika sudut pandang pelaksana dan pengambil keputusan berbeda maka banyak permasalahan yang akan terjadi. Terdapat dua dimensi disposisi antara lain yaitu sikap pelaksana dan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan (Richard, 2021).

Oleh karena itu, agar implementasi kebijakan menjadi efektif, pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan, namun juga memiliki kemampuan untuk melakukannya sedemikian rupa agar implementasinya tidak terjadi kesalahan.

d) Struktur Birokrasi

Dalam Implementasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan ciri-ciri, norma-norma dan pola-pola hubungan yang berulang-ulang terjadi pada badan eksekutif potensial dan aktual dengan apa yang dimilikinya dalam pelaksanaan kebijakan. (Kapustin, 2020) Dalam implementasi Kebijakan yang begitu kompleks memerlukan adanya kerja sama banyak pihak atau orang. Jika struktur birokrasi tidak mendukung kebijakan yang ada, maka akan menyebabkan tidak efektifnya sumber daya birokrasi sehingga akan mempersulit implementasi kebijakan. Oleh karena itu, para pelaksana politik harus mendukung kebijakan yang diputuskan secara politik dengan koordinasi yang baik.

METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berorientasi pada fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan dan lain-lain (Kucharska, 2023). Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggabungkan bukti-bukti dan mendeskripsikan makna, data, dan fenomena yang diperoleh oleh penelitian.

Pendekatan deskriptif ini diharapkan mampu menganalisis fakta yang terjadi lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

JENIS DATA

Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber data. Data primer diartikan data yang diperoleh berdasarkan observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan pihak terkait yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Kepala Desa, sekretaris, kaur keuangan, kasie kesejahteraan dan masyarakat desa.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara.. Data diperoleh dengan cara mengambil sumber lain sehingga bersifat tidak autentik karena sudah diperoleh dari tangan kedua maupun tangan ketiga dan seterusnya. Data sekunder dalam hal ini diperoleh melalui dokumentasi. Melalui pengambilan gambar maupun dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pada penelitian ini data dikumpulkan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi.

Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap suatu obyek yang diteliti untuk memperoleh data yang perlu dikumpulkan.

Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan informan. Komunikasi tersebut dilakukan dalam bentuk karya tanya jawab dan tatap muka. Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai permasalahan yang akan diteliti.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan sistematis mengumpulkan, meneliti, mengambil, menggunakan, dan menyediakan dokumen. Dalam hal ini dokumen digunakan untuk mencari informasi dan catatan peristiwa masa lalu (van den Berg, 2020). Dokumen-dokumen ini mencakup foto, video, surat, file audio, dan banyak lagi. Bentuk dokumentasi penelitian ini berupa pengambilan foto dan beberapa berkas dokumen yang diperlukan.

Tabel 1. Daftar Pengumpulan Data

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Baidowi	Kepala Desa Kemiri	1
2	Moh Falsafah	Sekertaris Desa Kemiri	1
3	Rizaq Kamal	Kasie Keuangan	1
4	Lutfi Efendi	Kasie Kesejahteraan	1
5	Ircash Akbar	Kepala Dusun	1
6	Joko Priyono	Warga Desa Kemiri	1
Total			6

ANALISIS DATA

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dari lapangan, selanjutnya akan peneliti analisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III yang terdiri dari empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Yang selanjutnya di analisis melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pembangunan Infrastruktur jalan

Kebijakan Pembangunan infrastruktur jalan desa merupakan salah satu prioritas pemerintah Desa Kemiri, untuk meningkatkan prasarana yang diperlukan oleh masyarakat serta pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat (Qahtan, 2023). Hal ini dibuktikan dengan adanya misi yang tertulis oleh pemerintahan Desa Kemiri tentang pembangunan jalan desa. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur di Desa Kemiri dalam beberapa tahun terakhir berfokus

pada jalan desa, sebagai upaya dalam pemerataan pembangunan di Desa Kemiri.

Kebijakan pembangunan infrastruktur jalan ini sebagai suatu bentuk respon dari pemerintah desa terhadap kondisi jalan yang kurang layak untuk digunakan sebagai akses masyarakat yang ada di Desa Kemiri, mulai dari banyaknya jalan yang rusak, bebatuan, belum meratanya jalan paving di dusun, dan jalan tanah yang becek ketika terjadi hujan.

Ada dua kriteria pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kemiri antara lain pembangunan jalan aspal dan pembangunan jalan paving. Ketentuan pembangunan jalan ini apabila jalan berupa jalan gang-gang kecil, atau jalan setapak yang menghubungkan antara satu dusun dengan dusun lainnya, maka pembangunan jalan tersebut kami bangun menggunakan paving. meskipun jalan tersebut bukan setapak tetapi jalanan tersebut bukan jalanan yang dilewati truk-truk yang muat pasir ataupun truk pengangkut kayu maka jalan tersebut termasuk kategori jalanan yang dibangun pavingisasi. Adapun untuk jalanan yang merupakan akses utama masyarakat, tempat lewat truk-truk pengangkut pasir, kayu dll, maka jalanan tersebut kategori jalanan yang dibangun menggunakan aspal, hal ini bertujuan agar jalanan tersebut kuat dan tidak mudah rusak (Ma, 2023).

Selanjutnya penulis akan menganalisis kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember menggunakan teori George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Komunikasi terbagi menjadi tiga dimensi dalam implementasi kebijakan yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, komunikasi dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Dimensi pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmission. Transmission komunikasi atau penyampaian informasi yang baik akan mendapatkan hasil implementasi yang baik pula (Lu, 2020). Komunikasi pemerintah desa dengan aparatur pelaksana dan juga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kemiri berjalan cukup baik. Komunikasi yang pertama yaitu antara kepala desa dan aparatur pelaksana, penyampaian komunikasi ini terjadi pada saat rapat terkait pembagian tugas masing-masing kepada setiap aparatur pelaksana serta agar terjadi koordinasi yang baik pada saat pembangunan infrastruktur jalan dilaksanakan antara kepala desa dan aparatur pelaksana.

Penyampaian komunikasi yang kedua yaitu terkait penggunaan sumber daya anggaran Dana Desa (DD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan. penyampaian ini dilakukan dengan metode secara tidak langsung yaitu menggunakan baliho yang dipasang di tempat pembangunan jalan dilaksanakan ketika sudah selesai. metode ini dianggap efektif dalam pelaksanaannya, selain untuk mempermudah masyarakat mengetahui sumber dana yang digunakan, penyampaian komunikasi seperti ini dianggap paling pas untuk menyampaikan terkait jumlah anggaran yang dipakai dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan.

Penyampaian komunikasi yang ketiga yakni terkait hasil kebijakan pembangunan infrastruktur jalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. komunikasi ini berupa waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan akan dilakukan, serta apakah ada jalan alternatif lain yang dapat digunakan ketika pembangunan infrastruktur jalan tersebut di mulai (Xing, 2022). Penyampaian komunikasi dilakukan dari pemerintah desa kepada setiap kepala dusun yang berada di wilayah pembangunan jalan dilaksanakan, kemudian kepala dusun nantinya akan menyampaikan kepada setiap RT/RW setempat, sehingga informasi tersebut akan mudah tersampaikan kepada masyarakat.

Penyampaian komunikasi yang terakhir yaitu antara pemerintah desa kepada pihak tim pelaksana kegiatan (TPK) mengenai hal teknis-teknis pembangunan infrastruktur jalan seperti peralatan yang digunakan, spesifikasi teknis, gambar-gambar pembangunan jalan dan lain sebagainya, Terkait hal tersebut kepala desa memberikan wewenang kepada tim pelaksana

kegiatan (TPK) guna keefektivitasan pembangunan infrastruktur jalan yang dilaksanakan.

Dimensi kedua adalah kejelasan komunikasi. kejelasan komunikasi ini merupakan elemen penting. Kejelasan komunikasi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik. Jika suatu kebijakan ingin dilaksanakan sesuai keinginan, pedoman pelaksanaannya tidak hanya harus disetujui oleh pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut, namun komunikasi yang diberikan juga harus jelas (Zhang, 2020). Komunikasi yang tidak jelas mengenai implementasi kebijakan menyebabkan kesalahpahaman atau bahkan bertentangan dengan maksud pesan awal.

Kejelasan komunikasi dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kemiri, terdiri dari penyampaian informasi oleh pemerintah desa kepada aparaturnya pelaksana dan masyarakat. Keterbukaan mengenai informasi pembangunan infrastruktur jalan dilakukan dengan tujuan agar seluruh pemangku kebijakan pembangunan infrastruktur jalan mengetahui secara jelas informasi apa saja yang telah disampaikan oleh kepala desa (Zhong, 2022). apabila terdapat permasalahan dalam hal penyampaian informasi yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan ini maka kepala desa menjadi orang pertama yang bertanggungjawab.

Setiap informasi yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan disampaikan langsung oleh pemerintah desa kepada aparaturnya pelaksana dan masyarakat Desa Kemiri. Kejelasan informasi yang disampaikan sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemahaman yang baik oleh aparaturnya pelaksana terkait tugas serta perannya terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan (Landge, 2020). Selain itu, pemahaman yang baik juga ditunjukkan oleh masyarakat Desa Kemiri terkait arahan dan petunjuk yang dilakukan oleh pemerintah desa khususnya dalam penggunaan jalan alternatif yang bisa dilalui oleh masyarakat.

Dimensi yang terakhir dalam komunikasi terkait implementasi kebijakan yaitu konsistensi penyampaian informasi. Konsistensi informasi merupakan suatu penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikotor yang tepat, jelas dan tidak berubah-ubah. Suatu informasi yang berubah-ubah akan menyulitkan pihak pelaksana dalam meimplementasikan kebijakan.

Konsistensi penyampaian informasi yang disampaikan oleh kepala Desa Kemiri kepada aparaturnya pelaksana terkait pembagian tugas atau jobdesknya serta kewenangan masing-masing bidang, dapat dikatakan konsisten, jobdesk atau tugas yang dimandatkan sejak awal kepada aparaturnya pelaksana tidak pernah berubah-ubah, konsisten dengan apa yang disampaikan sejak awal (Western, 2021). Konsistensi ini sangat penting dalam implementasi kebijakan, apabila informasi yang diterima berubah-ubah, cenderung tidak konsisten maka hal tersebut akan menjadi faktor penghambat dalam komunikasi.

Selain itu, konsistensi penyampaian informasi dalam kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kemiri yaitu ketika pelaksanaan pembangunan jalan dilaksanakan berupa informasi yang disampaikan oleh kepala desa kepada kepala dusun di wilayah yang bertempat lalu informasi tersebut disampaikan kepada ketua RT/RW, informasi tersebut berupa waktu pelaksanaan pembangunan dan penggunaan jalan alternatif yang dapat dilalui, penyampaian informasi ini berulang-ulang setiap pembangunan jalan dilakukan serta dilakukan secara konsisten.

Sumberdaya

Sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Sumber daya tersebut meliputi staff, fasilitas, sumber daya anggaran dan kewenangan. Sumber daya dapat dikatakan baik dilihat dari sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas dan kewenangan yang dijalankan.

Sumber daya manusia di dalam suatu organisasi merupakan hal yang penting. Ketersediaan staff dalam penelitian ini yaitu aparaturnya pelaksana pembangunan infrastruktur jalan yang dimiliki oleh Desa Kemiri yang berjumlah sepuluh orang, yang terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, kaur keuangan, kasie kesejahteraan dan enam kepala dusun. Dari segi kualitas aparaturnya pelaksana dapat dikatakan baik, 80% dari aparaturnya pelaksana ini lulusan sarjana (strata-1), namun dari segi kuantitas aparaturnya pelaksana aparaturnya pelaksana pembangunan jalan

ini masih kurang mengingat banyaknya tugas yang harus dilaksanakan.

Dimensi yang kedua dari sumber daya implementasi kebijakan yaitu sumber daya anggaran. Dimensi lain dari sumber daya implementasi kebijakan adalah sumber daya anggaran. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa sumber daya anggaran. Oleh karena itu, sumber daya anggaran menjadi landasan keberhasilan implementasi kebijakan ini. Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal untuk menjamin pelaksanaan kebijakan karena tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan ini juga tidak dapat berjalan dengan baik apabila tanpa adanya dukungan dari anggaran. Berdasarkan hasil penelitian, anggaran dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kemiri Kecamatan Panti bersumber dari Dana Desa (DD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pada kebijakan pembangunan infrastruktur jalan anggaran yang didapatkan masih kurang, karena pemerintah desa sendiri tidak hanya berfokus pada pembangunan jalan saja, sehingga anggaran yang di dapat dibagi-bagi.

Sumberdaya fasilitas termasuk faktor yang tidak kalah pentingnya dengan sumber daya lainnya dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan ini. Pengadaan fasilitas yang layak seperti bulldoser, dan alat-alat lainnya yang mendukung dalam pelaksanaan pembangunan jalan ini. Dengan adanya penggunaan fasilitas yang baik maka akan menunjang keberhasilan kebijakan pembangunan jalan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa fasilitas untuk melaksanakan kebijakan pembangunan jalan belum cukup memadai. Di Desa Kemiri belum memiliki fasilitas sendiri untuk digunakan dalam melaksanakan pembangunan jalan, fasilitas yang digunakan oleh pemerintah Desa Kemiri seperti bulldoser, truk atau alat-alat lainnya melalui sistem sewa kepada pihak-pihak yang memiliki. Penggunaan alat dengan sistem sewa ini sesuai dengan kewenangan yang di berikan oleh kepala desa kepada pihak Tim Pelaksana Kegiatan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan jalan di lapangan salah satunya yaitu penyediaan fasilitas yang akan digunakan.

Selain sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas yang digunakan, yang terakhir yaitu kewenangan dari aparatur pelaksana pembangunan infrastruktur jalan. Kewenangan ini berupa pelaksanaan tugas yang di lakukan oleh aparatur pelaksana terhadap tugas yang diberikan oleh kepala desa. pelaksanaan tugas aparatur pelaksana pembangunan infrastruktur jalan di desa kemiri saat ini sudah berjalan dengan lancar, setiap aparatur pelaksana melakukan tugas dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan apa yang sudah di mandatkan sejak awal oleh kepala Desa Kemiri.

Disposisi

Disposisi merupakan watak atau karakteristik yang di miliki oleh implementor Sikap inilah yang menentukan keberhasilan implementasi politik. Apabila pelaksana mempunyai sikap yang baik maka ia dapat melaksanakan kebijakan yang baik sesuai keinginan pengambil keputusan. Disposisi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena pelaksana harus memahaminya dan mempunyai gambaran yang baik dalam menjalankan setiap tugasnya.

Dalam penelitian ini Disposisi berupa sikap dan tingkat kepatuhan aparatur pelaksana. Kedua dimensi ini berpengaruh penting terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dalam upaya pemerataan pembangunan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Sebab selain memiliki sikap atau komitmen yang baik, aparatur pelaksana juga harus mampu memahami, menanggapi dan memenuhi apa saja yang terkait pembangunan infrastruktur jalan ini.

Dimensi yang pertama yakni sikap aparatur pelaksana berupa komitmen. Komitmen ini dibuktikan dengan melihat alasan implementor untuk dapat melaksanakan implementasi, tujuan atau perubahan yang ingin dicapai, dan perubahan yang telah dicapai para implementor untuk implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan.

Aparatur pelaksana telah memperlihatkan bahwa komitmen yang dimiliki dalam

menjalankan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan ini sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan serta adanya kemauan yang kuat dari aparatur pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Selain itu, komitmen ini diperkuat dengan kemauan dari aparatur pelaksana untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mewujudkan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan yang lebih optimal lagi.

Komitmen aparatur pelaksana ditunjukkan dengan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku dengan standarisasi yang dilaksanakan seperti melakukan pertimbangan, pemantauan dan lain sebagainya. Sikap aparatur pelaksana pembangunan infrastruktur jalan dalam menjalankan komitmen yang dimandatkan oleh kepala Desa Kemiri cukup baik yang dibuktikan dengan adanya pemahaman yang baik mengenai isi kebijakan terkait pembangunan infrastruktur jalan.

Berdasarkan hasil penelitian, sikap aparatur pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dapat dilihat dari sikap aparatur dalam memberikan informasi yang tepat dan baik kepada masyarakat Desa Kemiri khususnya dalam hal informasi penggunaan alternatif jalan yang digunakan ketika pembangunan jalan dimulai atau dilaksanakan.

Dimensi yang kedua dalam disposisi implementasi kebijakan yaitu tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan di artikan sebagai hubungan antara atasan yakni kepala Desa Kemiri dengan bawahannya yakni aparatur pelaksana yang dapat berupa komitmen dan kejujuran aparatur pelaksana dalam mengimplementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan.

Tingkat kepatuhan aparatur pelaksana dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan cukup patuh pada kebijakan, hal tersebut terbukti dengan adanya komitmen dan kejujuran dari aparatur pelaksana ketika diberikan mandat oleh kepala Desa Kemiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing. Komitmen yang dimaksud berupa patuhnya aparatur pelaksana kepada aturan-aturan yang berlaku menjalankan kewenangannya masing-masing.

Selain itu, aparatur pelaksana dalam mengimplementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan memiliki rasa tanggungjawab terhadap apa yang telah di mandatkan oleh kepala Desa Kemiri, sehingga hal tersebut mendorong aparatur pelaksana untuk lebih mematuhi dan melaksanakan kebijakan untuk lebih optimal.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan. Struktur birokrasi mempunyai dua ciri utama yaitu prosedur atau sering disebut Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. SOP yang baik adalah SOP yang memuat kerangka kerja yang jelas, sistematis, sederhana dan mudah dipahami oleh semua orang karena menjadi acuan kerja para pelaksana.

Adanya SOP diharapkan dapat memudahkan para pejabat eksekutif politik dalam menjalankan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan dalam SOP, sehingga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dapat tercapai, serta struktur organisasi eksekutif dapat terhindar dari kerumitan hal-hal yang panjang dan rumit. dari.

Mengenai struktur birokrasi dan Standart Operating Procedures (SOP) terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. aparatur pelaksana dalam menjalankan kebijakan ini belum memiliki SOP secara khusus, artinya tidak ada aturan yang baku dalam menjalankan perintah, setiap aparatur pelaksana hanya berkomitmen dan patuh terhadap perintah dari kepala desa. Namun meskipun belum memiliki SOP yang baku, aparatur pelaksana memiliki struktur birokrasi yang jelas mulai dari pembagian tugas dan kewenangannya di masing-masing bidang.

Tugas dari setiap aparatur pelaksana terlihat dari struktur birokrasi yang ada, sehingga meskipun dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan belum memiliki SOP khusus, aparatur pelaksana tidak akan memiliki tugas ganda, semua akan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Selain itu aparatur pelaksana juga menjalankan kebijakan ini dengan tetap menunggu arahan dan perintah yang lebih lanjut ketika kebijakan sudah di implementasikan.

Dimensi yang kedua yaitu fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab. Dimensi ini akan sangat berpengaruh untuk membentuk pola kerja yang baik di pemerintahan Desa Kemiri. Pola hubungan kerja yang terjadi di pemerintahan Desa Kemiri baik sehingga kinerja yang dihasilkan dalam mengimplementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan baik pula. Kerja sama antara pemerintah desa dengan aparaturnya dalam membangun infrastruktur jalan sangat baik, mereka saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain.

Tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing aparat disesuaikan dari kewenangan yang pada masing-masing bidangnya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab yang dilakukan oleh aparaturnya dalam membangun infrastruktur jalan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember cukup baik, mereka saling bekerja sama dan selalu berkoordinasi satu sama lain dalam menjalankan tugasnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kemiri berjalan baik, hal itu ditunjukkan dengan adanya komunikasi yang baik antara kepala desa, aparaturnya dan masyarakat desa, selain itu sumber daya yang dimiliki cukup baik seperti sumber daya manusia (staff), fasilitas dan kewenangannya, namun dari segi sumber daya anggaran pembangunan infrastruktur jalan Desa Kemiri hanya memiliki dua sumber anggaran yaitu dana desa dan dana bagi hasil, hal ini menjadi penghambat tersendiri demi tercapainya pembangunan infrastruktur jalan yang optimal, sebab kedua sumber ini tidak hanya berfokus pada pembangunan jalan saja melainkan pada pembangunan yang lain juga di Desa Kemiri. Faktor selanjutnya yaitu disposisi yang kuat hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kemauan dan penerimaan kebijakan dari aparaturnya, dan komitmen terhadap tugas dan kewenangannya yang telah di mandatkan oleh kepala desa. Demikian pula struktur birokrasi yang berjalan dengan optimal dari semua pihak meskipun tidak mempunyai SOP yang baku untuk dijalankan namun semua pihak yang terkait mampu bertanggungjawab dengan maksimal.

Saran

Penelitian ini adalah yang melakukan analisis terhadap kebijakan yang dilaksanakan, untuk mengoptimalkan kebijakan pembangunan jalan ini perlu adanya perbaikan dari faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini seperti sumber daya anggaran yang terbatas sehingga memerlukan sumberdaya yang lain untuk mencapai tujuan pemerataan pembangunan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Albeta
- Anggara, Sahya. (2014). *Pengantar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Cahyani, L. E., Fatchuriza, M., & Rahmawati, M. P. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN LANGENHARJO DI KABUPATEN KENDAL (Studi Kasus Kerusakan Jalan di Kelurahan Langenharjo). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 346–361. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.3112>
- Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1086–1095. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.479>
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 67–78. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>
- Novan, M., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.

- Pratama, S. I., & Randianto, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Pesisir Tanjungpinang. *Student Research Journal*, 1(220-231). implementasi kebijakan
- Purnawan, H. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MAKARTITAMA DAN DI DESA ULAK MAS KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT. *MIMBAR: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1), 35–36.
- Rahman, A. Z., & Novitasari, D. (2018). Kebijakan pembangunan desa melalui pembangunan infrastruktur transportasi dalam upaya pemerataan pembangunan. *JURNAL MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, 3(2), 85–91. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/gp/article/view/21290>
- Sasmito, C. (2017). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(3), 72. www.publikasi.unitri.ac.id
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (n.d.).
- Widodo, Joko. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Allouhi, A. (2022). Up-to-date literature review on Solar PV systems: Technology progress, market status and R&D. *Journal of Cleaner Production*, 362. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132339>
- Bearak, J. (2020). Unintended pregnancy and abortion by income, region, and the legal status of abortion: estimates from a comprehensive model for 1990–2019. *The Lancet Global Health*, 8(9). [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30315-6](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30315-6)
- Brůna, T. (2021). BRAKER2: Automatic eukaryotic genome annotation with GeneMark-EP+ and AUGUSTUS supported by a protein database. *NAR Genomics and Bioinformatics*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.1093/nargab/lqaa108>
- Fawzy, S. (2020). Strategies for mitigation of climate change: a review. *Environmental Chemistry Letters*, 18(6), 2069–2094. <https://doi.org/10.1007/s10311-020-01059-w>
- Jordt, S. E. (2023). Synthetic nicotine has arrived. *Tobacco Control*, 32. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2021-056626>
- Kapustin, N. O. (2020). Long-term electric vehicles outlook and their potential impact on electric grid. *Energy Policy*, 137. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111103>
- Kucharska, W. (2023). Tacit knowledge acquisition & sharing, and its influence on innovations: A Polish/US cross-country study. *International Journal of Information Management*, 71. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102647>
- Landge, A. N. (2020). Pattern formation mechanisms of self-organizing reaction-diffusion systems. *Developmental Biology*, 460(1), 2–11. <https://doi.org/10.1016/j.ydbio.2019.10.031>
- Lu, C. (2020). Inequalities in early childhood care and development in low/middle-income countries: 2010-2018. *BMJ Global Health*, 5(2). <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-002314>
- Ma, T. (2023). Assessment of a new multigeneration system based on geothermal plant and a linear Fresnel reflector-based solar unit: An effort to improve performance. *Process Safety and Environmental Protection*, 171, 896–913. <https://doi.org/10.1016/j.psep.2023.01.071>
- Ndwanwe, D. (2021). COVID-19 vaccines. *Current Opinion in Immunology*, 71, 111–116. <https://doi.org/10.1016/j.coi.2021.07.003>
- Qahtan, S. (2023). Evaluation of agriculture-food 4.0 supply chain approaches using Fermatean probabilistic hesitant-fuzzy setsbased decision making model. *Applied Soft Computing*, 138. <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2023.110170>
- Richard, A. M. (2021). The Tox21 10K Compound Library: Collaborative Chemistry Advancing Toxicology. *Chemical Research in Toxicology*, 34(2), 189–216. <https://doi.org/10.1021/acs.chemrestox.0c00264>
- van den Berg, N. J. (2020). Implications of various effort-sharing approaches for national carbon budgets and emission pathways. *Climatic Change*, 162(4), 1805–1822.

<https://doi.org/10.1007/s10584-019-02368-y>

Western, M. J. (2021). The effectiveness of digital interventions for increasing physical activity in individuals of low socioeconomic status: a systematic review and meta-analysis.

International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 18(1).

<https://doi.org/10.1186/s12966-021-01218-4>

Xing, J. (2022). A Review of Nonaqueous Electrolytes, Binders, and Separators for Lithium-Ion Batteries. *Electrochemical Energy Reviews*, 5(4). <https://doi.org/10.1007/s41918-022-00131-z>

Zhang, S. (2020). Barrier Designs in Perovskite Solar Cells for Long-Term Stability. *Advanced Energy Materials*, 10(35). <https://doi.org/10.1002/aenm.202001610>

Zhong, M. (2022). Emerging Organic Contaminants in Chinese Surface Water: Identification of Priority Pollutants. *Engineering*, 11, 111–125.

<https://doi.org/10.1016/j.eng.2020.12.023>